

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dinamika politik dunia menuntut negara untuk memiliki pandangan strategis agar dapat mencapai kepentingan nasional. Geopolitik pun hadir untuk memfasilitasi negara-negara dalam melihat fenomena politik dunia. Geopolitik memusatkan perhatian pada pemahaman geografis implisit tentang politik dunia yang dimobilisasi oleh para aktor internasional (Dodds, 2007, hal. 9). Tujuan geopolitik adalah untuk menekankan bahwa dominasi politik tidak hanya tentang memiliki kekuasaan sumber daya manusia atau material, tetapi juga dalam konteks geografis. Kekuasaan dilaksanakan dalam sebagian besar kegiatan internasional yang melibatkan beberapa unsur oposisi, perlawanan, perjuangan atau konflik, faktor lokasi, serta ruang dan jarak antar pihak yang berinteraksi sebagai variabel (Sloan, 2013, hal. 2). Meskipun geopolitik masih sering menjadi ‘kontroversi’ dalam studi hubungan internasional, tidak dapat dipungkiri bahwa pandangan ini membantu kita menafsirkan dunia dalam konteks politik dan geografis yang sangat kompleks. Selanjutnya, kompleksitas dunia membawa konsekuensi berupa konflik yang dapat menjadi sumber ancaman bagi negara-negara, baik ancaman tradisional maupun non-tradisional. Ancaman inilah yang kemudian mendorong negara-negara untuk dapat merumuskan strategi geopolitik.

Momentum kebangkitan Cina pada tahun 1970 menjadi awal terbentuknya kondisi geopolitik dunia di abad ke-21. Mulanya pusat persaingan dunia berlokasi di sekitar Laut Atlantik, tetapi kini bergeser menuju Laut Pasifik. Cina telah berhasil mengubah struktur internasional yang sebelumnya unipolar, yaitu dikuasai oleh Amerika Serikat pasca runtuhnya Uni Soviet. Cina mengalami tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) riil yang mencengangkan sejak akhir 1970-an, yakni seringkali melebihi 10% setiap tahun (Fels, 2016, hal. 6). Diukur dalam dolar AS menggunakan nilai tukar nominal, nominal PDB China pada tahun 2018 dalam dolar AS mencapai \$ 13,4 triliun, yang artinya 65,3% dari ukuran ekonomi AS, menurut perkiraan yang dibuat oleh IMF (Morrison, 2019, hal. 9). Cina menjadi negara Asia yang mampu menyaingi kekuatan adidaya AS dalam bidang perekonomian. Lebih jauh, Cina juga turut memodernisasi atau meningkatkan kekuatan militernya, *People Liberation Army* (PLA), untuk menunjukkan kekuatannya di kawasan Asia Pasifik (Hasian, 2021). Pada akhirnya, kebangkitan Cina menyebabkan kondisi *rebalancing* atau menyeimbangkan kembali. Maksud dari *Rebalancing* adalah kondisi dunia di mana AS kurang menonjol dan kurang tegas, sehingga memilih untuk tidak memimpin dari depan (Klieman, 2015, hal. 5).

Merasa khawatir dengan kondisi tersebut, Amerika Serikat mulai membatasi pergerakan Cina dari segi ekonomi, militer, maupun politik. Dalam bidang ekonomi, lebih dari 800 produk Cina di sektor industri dan transportasi, serta barang-barang seperti televisi dan peralatan medis, dikenakan pajak impor senilai 25% oleh pemerintah AS (Febrina et. al, 2018, hal. 146). Kebijakan tersebut

diterapkan pada masa Presiden Donald Trump. Tujuannya adalah untuk menekan permintaan konsumen dalam negeri terhadap barang-barang Cina. Dengan begitu, surplus pada neraca perdagangan Cina akan berkurang. Kemudian, AS menyoal pada konflik Laut Cina Selatan (LCS) untuk meredam pergerakan Cina dalam bidang militer. Khususnya terkait sengketa Kepulauan Paracel dan Spratly. Sengketa ini menaikkan temperatur di antara Cina dan negara-negara ASEAN. AS pun hadir dan mencoba menindaklanjuti masalah tersebut dengan tawaran untuk memfasilitasi resolusi multilateral atas klaim Laut China Selatan yang tumpang tindih (Chang, 2011, hal. 21). Terakhir, dalam bidang politik, AS terus meningkatkan kehadirannya dengan cara terlibat dalam berbagai forum kerjasama di kawasan Asia Pasifik. Contohnya seperti dalam *Trans Pacific Partnership* (TPP) dan *Asia Pacific Economic Cooperation* (APEC).

Tidak dapat dipungkiri bahwa Asia Pasifik tengah menjelma menjadi kawasan yang sangat strategis bagi para aktor internasional. Kawasan Asia Pasifik menyimpan potensi alam yang melimpah, baik di darat maupun di laut. Contohnya seperti potensi sumber daya alam di perairan Hindia dan Pasifik berupa minyak bumi dan gas alam (Mintratama, 2016, hal. 37). Kawasan ini juga merupakan kawasan yang paling dinamis pertumbuhan ekonominya (Al Syahrin, 2018, hal. 146). Selain itu, besarnya populasi yang tinggal di kawasan ini juga menjadi keuntungan bagi negara-negara yang menjadika Asia Pasifik sebagai mitra kerjasama. Lebih dari 2,2 miliar populasi dunia tinggal kawasan ini. Keunggulan-keunggulan tersebut membuat Asia Pasifik mejadi titik pertemuan baru dari persaingan negara-negara di dunia.

Namun, kondisi tersebut membuat rivalitas di kawasan Asia Pasifik justru semakin menajam, tidak terkecuali bagi Asia Tenggara. Dampak rivalitas dua negara adidaya dirasakan oleh negara-negara anggota ASEAN yang bergantung kepada kegiatan ekspor kedua negara tersebut, seperti Singapura, Vietnam, Malaysia, dan Thailand (Febrina et. al, 2018, hal. 146). Selain itu, wilayah laut yang menjadi penghubung negara-negara Asia Tenggara turut terancam kedamaiannya. Bahkan AS dan Cina sama-sama mengincar Selat Malaka dan Laut Cina Selatan (Hendrajit, 2017, hal. 38). Perairan ini adalah jalur perairan yang penting dalam lalulintas laut di dunia. Hal tersebut juga tidak terlepas dari lokasi Asia Tenggara yang terletak di persimpangan antara konsentrasi kekuatan industri, teknologi, dan militer di Asia Timur Laut, anak benua India dan sumber minyak di Timur Tengah, serta Australia dan Pasifik Barat Daya (Rabasa & Chalk, 2001, hal. 1).

Sehubungan dengan meningkatnya rivalitas di kawasan, Indonesia memiliki kepentingan untuk turut mencari solusi atas permasalahan tersebut. Indonesia, sebagai *rising middle power*, berupaya memperkuat perannya di kawasan Asia Pasifik guna menghindari konflik regional atau *codominium of power* antara dua negara adidaya (Poling, 2013). Oleh sebab itu, ketika Indonesia menjabat sebagai ketua ASEAN di tahun 2011, Menteri Marty Natalegawa mengemukakan sebuah gagasan yang disebut *Dynamic Equilibrium* atau keseimbangan dinamis. Marty Natalegawa menyampaikan gagasan tersebut melalui pidatonya dalam “*The Indonesia Conference: His Excellency Dr. R. M. Marty M. Natalegawa Minister of Foreign Affairs*” yang dapat dilihat dalam kanal YouTube milik CSIS (*Center for Strategic and International Studies*). Menteri Marty menjelaskan *Dynamic*

Equilibrium dalam dua terminologi. Kata “*dynamic*” menunjukkan pengakuan terhadap perubahan konstan yang terjadi di kawasan. Oleh sebab itu, semua entitas harus mencoba untuk masuk ke dalamnya, karena perubahan itu inheren dan alami sehingga tidak bisa ditolak. Di sisi lain, “*equilibrium*” atau keseimbangan juga dibutuhkan, mengingat perubahan ini tidak boleh sampai menyiratkan keadaan yang anarkis. “Kita tidak bisa melihat kawasan kita didominasi oleh negara manapun”, kata menteri Marty dalam pidato tersebut. Gagasan *Dynamic Equilibrium* atau disebut juga dengan Doktrin Natalegawa menginginkan pembangunan arsitektur keamanan, ekonomi, dan stabilitas kawasan secara damai.

Pergantian presiden Indonesia, dari periode Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke periode Joko Widodo, tidak menyurutkan upaya Indonesia dalam meredam rivalitas kawasan. Pada kepemimpinan Joko Widodo di periode kedua, fenomena rivalitas ini bahkan semakin diperkeruh dengan pengumuman perang dagang antara AS dan Cina. Presiden Joko Widodo khawatir perang dagang tersebut akan menjadi “*multi-front war*” (Republik Indonesia, 2019). Akhirnya, Indonesia mencetuskan Konsep Indo-Pasifik untuk menahan dampak yang lebih besar dari menajamnya rivalitas kawasan. Pada KTT ASEAN Ke-34 tahun 2019 di Bangkok, Thailand, konsep ini diadopsi oleh ASEAN sebagai *legal framework* dalam kerjasama dengan negara-negara mitra. Berdasarkan dokumen ‘*ASEAN Outlook on the Indo-Pacific*’, Konsep Indo-Pasifik didefinisikan sebagai perspektif ASEAN memandang kawasan Asia-Pasifik dan Samudra Hindia, bukan sebagai ruang teritorial yang bersebelahan. Namun, sebagai kawasan yang terintegrasi dan saling berhubungan, dengan ASEAN memainkan peran sentral dan strategis.

Terminologi Indo-Pasifik sendiri merupakan akronim dari *Indian Ocean* dan Asia Pasifik.

Riset mengenai *Dynamic Equilibrium* dan *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* telah banyak dilakukan. Sebastian (2013) berpendapat bahwa kebijakan luar negeri Indonesia, di bawah pimpinan Presiden SBY, tidak benar-benar memprioritaskan sentralitas ASEAN. Milner (2019) berpendapat bahwa gagasan *Dynamic Equilibrium* menjadi kunci dalam reposisi Indonesia di tengah kuatnya pengaruh barat terhadap kawasan. Lebih lanjut, penelitian terkait gagasan *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* dapat dilihat dalam riset Anwar (2020) yang berpendapat bahwa AOIP (*ASEAN Outlook on the Indo-Pacific*) memiliki prospek sebagai *platform* kerjasama sekaligus menerima pandangan skeptis karena hanya berisi panduan dan bukan berisi teknis kerjasama. Ha (2019) berpendapat bahwa dokumen AOIP penting bagi negara-negara ASEAN terutama dalam menunjukkan pandangan kolektif terhadap kawasan Indo-Pasifik.

Belum ditemukan penelitian terdahulu yang berusaha mengkomparasi antara gagasan *Dynamic Equilibrium* dan *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific*. Penelitian terdahulu hanya menguraikan salah satu gagasan ataupun mengulas *outcome* dari implementasi gagasan-gagasan tersebut. Deskripsi tentang karakteristik dari kedua gagasan juga telah banyak diuraikan. Namun, karakteristik kedua gagasan diuraikan dalam penelitian yang berbeda. Sehingga penelitian komparatif kedua gagasan tersebut terbilang baru dalam studi hubungan internasional.

1.2 Perumusan Masalah

Pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimana perbandingan karakteristik gagasan *Dynamic Equilibrium* dan *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific*?

1.3 Tujuan dan Kontribusi Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan karakteristik gagasan *Dynamic Equilibrium* dan *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific*.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pada dunia akademik, khususnya terhadap studi Asia Tenggara, studi kebijakan luar negeri Republik Indonesia, serta memajukan teori liberalisme institusionalis. Sehingga para pembaca dapat memperkaya wawasan ataupun menjadikan penelitian ini sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Pada dunia praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjembatani jurang pemisah kajian teori dan praktik lapangan. Sehingga para pembuat kebijakan memiliki landasan ketika merumuskan kebijakan ataupun strategi politik. Terutama dalam mengembangkan strategi geopolitik bagi ASEAN.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1 Liberalisme Institusionalis

Pada dasarnya, negara-negara tidak dapat menghindari interaksi satu sama lain. Dari titik inilah interdependensi terbentuk. Negara-negara akan saling bergantung untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin beragam. Akhirnya, negara harus melaksanakan kerjasama karena telah terdesak oleh kondisi tersebut. Untuk meringkas secara lebih formal, kerjasama antar pemerintah (negara) terjadi ketika kebijakan yang benar-benar diikuti oleh satu pemerintah dianggap oleh mitranya memfasilitasi realisasi tujuan mereka sendiri, sebagai hasil dari proses koordinasi kebijakan (Keohane, 1984, hal. 52). Konsepsi dunia seperti ini dicetuskan oleh kaum liberalisme.

Pada perdebatan hubungan internasional pertama, paradigma liberalisme hadir sebagai kritik terhadap paradigma realisme. Realisme percaya bahwa politik diatur oleh hukum obyektif yang berakar pada sifat manusia (Morgenthau, 1997, hal. 4). Sifat dasar manusia yang jahat membuat negara-negara saling bersaing untuk mendapatkan kekuasaan. Perebutan kekuasaan menyebabkan terjadinya banyak peperangan di dunia dan membuat kondisi dunia tidak damai. Realisme juga beranggapan bahwa negara akan selalu menaruh kecurigaan satu sama lain. Meskipun kerjasama telah diupayakan, hasil dari kerjasama tersebut tidak akan seimbang. Satu pihak akan menang dan pihak yang lain akan kalah atau merasa dirugikan. Kondisi ini biasa disebut sebagai *zero sum game* dalam *game theory*. Sedangkan, berbanding terbalik dengan realisme, liberalisme justru sangat percaya bahwa perdamaian akan tercapai jika negara-negara di dunia mau bekerjasama

dalam sebuah wadah. Alih-alih menggunakan teori permainan (*game theory*) seperti realisme, liberalisme justru mengutamakan *win win solution* dalam menjalankan kerjasama.

Sebagai sebuah paradigma, liberalisme memiliki berbagai aliran teori. Salah satu alirannya adalah teori liberalisme institusionalis atau biasa juga disebut neoliberal institusionalis. Robert Owen Keohane merupakan salah satu tokoh penting dalam teori liberalisme institusionalis. Keohane tidak menolak klaim neorealis yang mengatakan bahwa selain dipengaruhi sifat dasar manusia, struktur dunia yang anarki juga membuat kerjasama sulit dilaksanakan. Struktur anarki dapat diartikan sebagai kondisi yang tidak aman dan penuh kecurigaan. Kondisi ini menekan semua negara untuk menjadi paling unggul supaya dapat menghindari ancaman. Sebagai konsekuensi, negara-negara di dunia sulit mencapai sebuah kesepakatan. Kemudian pandangan skeptis ini berusaha dijawab oleh kaum institusionalis. Kaum institusionalis memiliki optimisme terhadap kerjasama di antara negara-negara. Menurut institusionalis, solusinya adalah lewat perantara rezim internasional (Rosyidin M. , *Liberalisme*, 2020, hal. 53). Teori ini dapat menjembatani perbedaan di antara neorealisme dan liberalisme. Maka dari itu, teori liberalisme institusionalis dianggap relevan untuk menjadi pisau analisis dalam penelitian ini.

Rezim internasional atau institusi internasional merupakan konsep kunci dalam teori liberalisme institusionalis. Rezim mampu menyediakan kerangka atau aturan kerjasama yang mengikat dan memberikan tanggung jawab kepada masing-masing anggota kerjasama (Keohane, 1982, hal. 338). Aturan ini bukan hanya

mengacu pada nilai, norma, maupun prinsip internasional, melainkan harus bisa mengakomodir kepentingan aktor-aktor yang terlibat di dalamnya. Dalam teori liberal institusionalis ada perbedaan makna di antara norma dan aturan. Jika norma sangat sulit untuk diubah, maka aturan bersifat lebih fleksibel. Namun, aturan justru lebih spesifik menunjukkan secara lebih rinci tentang hak dan kewajiban khusus bagi anggota kerjasama (Keohane, 1984, hal. 58). Klaim utama tentang rezim adalah bahwa negara dapat menghasilkan rezim dalam isu yang teridentifikasi, bahkan dalam isu yang mengarah pada penyimpangan, sehingga memengaruhi perilaku mereka dan mendorong kerja sama (Levy, Young, & Zurn, 1995, hal. 271). Liberalisme institusionalis juga membangun asumsi bahwa negara perlu mengembangkan strategi-strategi dan forum-forum bagi kerjasama meliputi seluruh rangkaian isu dan wilayah-wilayah baru (Pettiford & Pettiford, 2009, hal. 130).

Negara sebenarnya mengalami masalah kolaborasi, dimana perilaku mementingkan diri sendiri berdampak pada hasil yang kurang baik (Stein, 2008, hal. 208). Dalam situasi kompleks yang melibatkan banyak negara, rezim internasional dapat turun tangan untuk memberikan "titik fokus yang dibangun" sehingga membuat hasil kerja sama lebih menonjol (Keohane R. O., 1995, hal. 45). Rezim internasional diharapkan dapat menghasilkan *output* maupun *outcome* yang menguntungkan bagi semua pihak. Kehadiran rezim-rezim internasional diharapkan dapat membuka peluang bagi semua negara untuk berada pada posisi sejajar. Sehingga, dalam sistem dunia tidak ada hierarki yang membuat satu negara

memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan negara lain. Dengan begitu, konflik di ranah internasional dapat dihindari.

Dalam memahami liberalisme institusionalis masih ditemukan kebingungan dalam memaknai penggunaan rezim atau institusi internasional dan organisasi internasional. Arthur A. Stein (2008) memberikan contoh dengan menggunakan hubungan di antara IAEA (*International Atomic Energy Agency*), NPT (*Non-Proliferation Treaty*), dan MTCR (*Missile Technology Control Regime*) sebagai upaya negara-negara mengatur proliferasi nuklir dan sistem pengirimannya. IAEA adalah organisasi internasional yang menghasilkan NPT. Kemudian beberapa tahun setelah NPT terbentuk, negara-negara penghasil rudal menginisiasi pembentukan MTCR. NPT dan MTCR dapat dianggap sebagai rezim atau institusi internasional (Stein, 2008, hal. 204). Dalam penelitian ini, organisasi internasional yang dimaksud oleh peneliti adalah ASEAN. Kemudian ASEAN menghasilkan berbagai rezim internasional yang mewadahi kerjasama bersama negara-negara mitra. Salah satu rezim yang dihasilkan oleh ASEAN adalah Kerjasama Indo-Pasifik atau dalam penelitian ini disebut sebagai *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific*. Rezim ini tidak menghasilkan organisasi yang baru lagi. Namun, ada pula beberapa rezim yang kembali melahirkan organisasi internasional.

1.5.2 Doktrin dalam Kebijakan Luar Negeri

Doktrin adalah ajaran (tentang asas suatu aliran politik atau keagamaan) secara bersistem, khususnya dalam penyusunan kebijakan negara (KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi online/daring (dalam jaringan), 2021). Doktrin juga dapat berarti keyakinan atau seperangkat keyakinan yang

diajarkan dan diterima oleh kelompok tertentu (Cambridge Dictionary, 2021). Selain itu, doktrin juga dapat didefinisikan sebagai pernyataan kebijakan resmi pemerintah, khususnya kebijakan luar negeri (Collin Dictionary, 2021). Sedangkan, doktrin dalam kebijakan atau politik luar negeri sendiri dapat didefinisikan sebagai sistem keyakinan normatif dan empiris tentang sistem internasional dan peran negara sendiri di dalam sistem tersebut, seperti yang dinyatakan di depan umum oleh pembuat kebijakan resmi suatu negara (Brodin, 1972, hal. 104). Jadi, dapat disimpulkan bahwa doktrin kebijakan luar negeri adalah sebuah sistem keyakinan yang digagas oleh aktor internasional dengan maksud tertentu.

Høiback (2011) berpendapat bahwa doktrin bagaikan sebuah resep yang mengandung tiga elemen dasar untuk memberi tahu kita cara menang dalam sebuah permainan. Elemen pertama adalah teori. Teori digunakan untuk merasionalisasikan alasan kita akan 'menang' dalam sebuah permainan. Sebab, pernyataan yang didukung oleh alasan biasanya memiliki daya persuasif yang tidak dimiliki oleh opini belaka (Høiback, 2011, hal. 883). Elemen kedua adalah budaya. Berkebalikan dari teori, budaya bersifat tidak rasional. Ada dua syarat supaya budaya dapat memiliki kemampuan mendoktrin, yaitu budaya harus memiliki kekuatan mendorong orang untuk bertindak dan menyebabkan sesuatu terjadi serta budaya juga harus manipulatif (Høiback, 2011, hal. 886). Elemen terakhir adalah wewenang atau dapat dikatakan sebagai elemen subordinasi. Tindak otoritatif diperlukan untuk memilih jalan mana yang harus ditempuh dan untuk mendukung pilihan teori yang dapat dipercaya (Høiback, 2011, hal. 887).

Selain tiga elemen, sistem keyakinan juga menjadi hal penting yang mendasari terbentuknya sebuah doktrin. Sebab, doktrin adalah salah satu hasil dari pembuatan keputusan yang dilakukan oleh aktor internasional. Sistem keyakinan aktor internasional memengaruhi pembuatan keputusan. Selain mengatur persepsi menjadi panduan perilaku yang bermakna, sistem kepercayaan memiliki fungsi penetapan tujuan dan pengaturan preferensi (Holsti, 1962, hal. 245). Ada dua cara hingga akhirnya sistem keyakinan dapat memengaruhi pembuatan keputusan. Cara pertama, sistem keyakinan berupa fakta di lapangan akan membentuk persepsi dari sebuah realitas. Kemudian, terjadilah pembuatan keputusan oleh aktor yang mempersepsikan fakta tersebut. Proses ini dikatakan sebagai proses tidak langsung. Sedangkan, proses langsung pembuatan keputusan hanya memunculkan pemikiran ‘apa yang seharusnya dilakukan?’. Selanjutnya, pembuatan keputusan pun terjadi. Namun, perubahan dunia yang terus terjadi membuat sistem kepercayaan begitu dinamis. Perubahan dunia membuat informasi yang ditangkap dan dipersepsikan oleh aktor sangat mungkin berubah-ubah. Maka dari itu, kebijakan yang dihasilkan juga cenderung variatif, tergantung pada bagaimana kondisi dunia dalam jangka waktu tertentu.

Doktrin memang tidak memiliki struktur yang baku. Namun, ada beberapa hal yang dapat menjadi patokan untuk menaikkan status sebuah gagasan sebagai doktrin. Hal-hal tersebut adalah menyatakan tujuan yang diakui dari kebijakan luar negeri, strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan yang dinyatakan, sumber daya nasional, sistem internasional (terutama pernyataan tentang penyebab perang dan perdamaian), para aktor yang memiliki relevansi utama untuk keamanan

nasional, niat dan kemampuan mereka (Brodin, 1972, hal. 105). Meskipun doktrin sering kali terlihat seperti gagasan yang sederhana, setidaknya doktrin juga harus mengandung kelima aspek di atas. Dengan begitu, doktrin dapat membawa manfaat yang lebih optimal seperti yang diharapkan oleh pembuatnya.

Doktrin memiliki dua karakteristik khusus, yang pertama adalah sederhana, ringkas, dan jernih serta yang kedua adalah abstrak dan fleksibel. Karakteristik pertama biasanya berbentuk pernyataan-pernyataan untuk menjadi panduan aksiomatik kebijakan yang harus didefinisikan secara sederhana, ringkas, dan jelas (Overholt & Chou, 2005, hal. 185). Strategi kesederhanaan ini harus dapat memfasilitasi kompleksitas dan dapat dielaborasi ke dalam kebijakan lain yang masih berhubungan atau kebijakan di bawah doktrin. Karakteristik sederhana, ringkas, dan jernih sering kali direpresentasikan melalui slogan-slogan berisi pernyataan tujuan. Slogan juga dibuat sesederhana mungkin supaya lebih mudah untuk memobilisasi dukungan massa. Karakteristik kedua adalah abstrak dan fleksibel yang bertujuan memberi kebebasan terhadap pembuatan kebijakan di bawahnya. Hal ini dilakukan untuk beberapa alasan, yaitu karena doktrin berfungsi sebagai pernyataan aksiomatik di dunia yang kompleks, doktrin juga diharapkan dapat memandu kebijakan dalam jangka waktu yang lama, serta doktrin bersifat abstrak dan fleksibel karena harus sederhana tetapi tetap mampu mengatasi kompleksitas, perubahan, dan keragaman pendapat (Overholt & Chou, 2005, hal. 186).

Dapat kita simpulkan bahwa doktrin kebijakan luar negeri memang bertujuan untuk menghimpun dukungan dari aktor-aktor lain atas keyakinan aktor

pembuatnya. Doktrin juga dapat menjadi pandangan terhadap suatu fenomena atau suatu isu yang terjadi. Untuk menekankan pentingnya sebuah doktrin, doktrin harus disebarkan melalui pengucapan secara berulang. Aktor pembuat doktrin harus selalu menyampaikan doktrin di setiap kesempatan supaya doktrin terdistribusi dengan baik. Pada saat yang sama, pengulangan menciptakan pola yang cenderung menyalurkan harapan aktor lain ke arah tertentu yang diinginkan (Brodin, 1972). Namun, tujuan ini berimplikasi pada terbatasnya ruang gerak pembuat kebijakan yang terikat pada doktrin. Maka dari itu, eksistensi doktrin masih menjadi pembahasan penting dalam lingkup hubungan internasional.

1.6 Operasionalisasi Konsep

Penelitian ini akan menggunakan konsep rezim internasional, gagasan, dan multilateralisme.

1.6.1 Rezim Internasional

Secara sederhana, fungsi utama rezim atau institusi adalah menetapkan aturan main yang memungkinkan para aktor bisa bekerjasama (Rosyidin M. , Liberalisme, 2020). Dalam menggunakan konsep rezim internasional, ada perbedaan antara norma dan aturan. Norma sendiri memiliki pengaruh kuat karena mengacu pada substansi. Norma berbicara tentang baik dan buruk, benar dan salah. Maka dari itu, sangat sulit mengubah norma yang dipegang oleh suatu entitas dalam hubungan internasional. Sedangkan, aturan yang dimaksud oleh rezim internasional bersifat lebih fleksibel. Aturan hanya menunjukkan bahwa para aktor yang terlibat dalam kerjasama memiliki hak dan kewajiban. Akhirnya, pada tingkat kekhususan

tertentu, aturan lebih mengacu pada prosedur daripada substansi, prosedur pengambilan keputusan rezim memberikan cara untuk menerapkan prinsip-prinsip mereka dan mengubah aturan mereka (Keohane R. , 1941, hal. 58). Dengan begitu, kehadiran rezim internasional dapat meminimalisir atau meredam konflik meskipun masing-masing negara memiliki kepentingan nasional yang ingin dicapai.

1.6.2 Gagasan

Ide didefinisikan sebagai keyakinan yang dipegang oleh individu untuk membantu menjelaskan hasil politik, terutama yang terkait dengan kebijakan luar negeri (Goldstein & Keohane, 1993, hal. 3). Ide atau gagasan terbagi menjadi 3 kategori, yaitu pandangan dunia (*world view*), keyakinan berprinsip (*principled belief*), dan keyakinan kausal (*causal belief*). *World view* adalah perspektif untuk menafsirkan dunia. Kemudian, *principled belief* adalah catatan normatif yang “menetapkan kriteria untuk membedakan yang benar dari yang salah. Terakhir, *causal belief* merupakan pengetahuan atau keyakinan tentang "hubungan sebab-akibat yang memperoleh otoritas dari konsensus bersama elit yang diakui". Selanjutnya, ide atau gagasan dapat memengaruhi kebijakan luar negeri melalui tiga cara. Pertama, sebagai *roadmap*, yaitu ketika ide memberikan strategi untuk mengejar tujuan tertentu dalam lingkungan internasional. Kedua, *focal point*, yakni ketika ide dapat menyediakan platform untuk menghilangkan perbedaan kepentingan di antara para pelaku. Ketiga, melembagakan atau *institutionalized*, yaitu disaat ide akan mempengaruhi kebijakan luar negeri ketika dilembagakan dalam struktur organisasi. Konsep ide atau gagasan sejalan dengan teori liberal

institusionalis yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam buku *Ideas and Foreign Policy* karya Keohane dan Goldstein juga dikatakan bahwa “ide dapat membantu mengatur dunia”. Memang kedua gagasan dalam penelitian ini juga bertujuan untuk mengatur dunia. Kedua gagasan ini muncul dari cara yang kedua, yaitu ide atau gagasan sebagai *focal point*. Sebab, ide yang dicetuskan oleh Indonesia ini dapat menyediakan *platform* kerjasama ASEAN dan negara-negara mitra.

1.6.3 Multilateralisme

Konsep multilateralisme menghendaki kerjasama yang dilakukan oleh tiga negara atau lebih. Oleh sebab itu, konsep ini sangat erat kaitannya dengan kerjasama di bawah organisasi-organisasi internasional. Kerjasama multilateralisme dilakukan dengan cara mengeneralisasi prinsip-prinsip perilaku dari negara yang terlibat di dalamnya. Multilateralisme menggambarkan bentuk kelembagaan generik dalam hubungan internasional (Ruggie, 1992, hal. 571). Pandangan Ruggie mengenai multilateralisme membawa kita pada tiga konsekuensi. Pertama, prinsip pengorganisasian umum harus membuat negara anggota kerjasama tidak terpisah dalam suatu kolektivitas yang telah disepakati. Ketidakterpisahan ini dapat dimaknai sebagai ruang lingkup, baik secara fungsional maupun secara geografis. Kedua, menurut Keohane, keberhasilan multilateralisme akan menghasilkan “timbal balik yang tersebar”. Maksudnya adalah setiap anggota kerjasama dapat merasakan manfaat yang setara. Konsekuensi ketiga, negara-negara anggota harus tunduk pada pedoman umum prinsip berperilaku. Ketiga konsekuensi ini harus diperlakukan sebagai ansambel koheren yang dengan

sendirinya tidak dapat dipisahkan, bukan sebagai indikator multilateralisme yang dapat dilepas dan aditif (Caporaso, 1992, hal. 602).

1.7 Argumen Penelitian

Peneliti meyakini adanya konsistensi antara gagasan *Dynamic Equilibrium* dan *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* dengan teori liberalisme institusionalis. Kedua gagasan sama-sama menyediakan pedoman kerjasama bagi ASEAN dan negara-negara mitra. Hal tersebut sudah sejalan dengan pandangan institusionalis yang beranggapan bahwa kerjasama dapat tercapai bilaman ada rezim internasional yang mengatur keberjalanannya. Kedua gagasan tersebut adalah strategi geopolitik Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan peran ASEAN dalam menjaga stabilitas kawasan Indo-Pasifik pasca munculnya persaingan di antara Amerika Serikat dan Cina. Namun, di antara *Dynamic Equilibrium* dan *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* memiliki perbedaan dalam bentuk luaran atau *output*. *Dynamic Equilibrium* hanya berbentuk doktrin dan tidak konkrit. Sedangkan, *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* telah diadopsi oleh ASEAN secara legal serta menjadi pedoman kerjasama ASEAN dan negara-negara mitra.

1.8 Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang berusaha menguraikan makna mendalam dari sebuah fenomena. Menurut Bogdan dan Taylor metode penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari perilaku orang yang diamati (Nugrahani, 2014, hal. 8). Sebab, penelitian ini menggunakan pola berfikir deduktif yang berangkat dari hal-hal

umum, menuju hal-hal khusus. Secara spesifik, penulis akan menggunakan komparatif deskriptif terhadap kedua gagasan.

1.8.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan tipe penelitian komparatif deskriptif yang bertujuan menganalisis persamaan dan perbedaan karakteristik gagasan *Dynamic Equilibrium* dan *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific*. Penelitian komparatif berbeda dari penelitian non-komparatif dalam upaya mencapai kesimpulan di luar kasus tunggal dan menjelaskan perbedaan serta persamaan antara objek analisis dan hubungan antar objek dengan latar belakang kondisi kontekstual mereka (Esser & Vliegthart, 2017, hal. 2). Ada empat syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan metode analisis komparatif. Pertama, tujuan komparasi terhadap objek penelitian harus jelas dan menjadi komponen penentu desain penelitian. Kedua, unit besar perbandingan harus diidentifikasi. Ketiga, objek analisis harus dibandingkan dengan satu atau lebih dimensi umum yang ekuivalen secara fungsional. Keempat, objek analisis harus dibandingkan atas dasar kerangka teori umum. Lebih lanjut, ada 4 tahap dalam melakukan metode analisis komparatif: (1) membandingkan insiden yang berlaku untuk setiap kategori, (2) mengintegrasikan kategori dan propertinya, (3) membatasi teori, dan (4) menulis teori (Glaser, 1965, hal. 439). Metode ini biasanya digunakan dalam menguji hipotesis dan bisa berkontribusi pada penemuan tak terduga dari hipotesis baru dan membangun teori (Collier, 1993, hal. 105). Namun, dalam penelitian deduktif, pengumpulan dan analisis data

ditempatkan sebagai alat analisis, bukan sebagai proposisi yang akan diuji kebenarannya.

1.8.2 Situs Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kementerian Luar Negeri RI serta kediaman narasumber karena penulis melakukan wawancara dengan narasumber di lokasi tersebut. Selain itu, tempat tinggal penulis dan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia juga akan menjadi tempat penelitian pada saat penulis melakukan studi kepustakaan.

1.8.3 Subjek Penelitian

Penelitian teoritis menjadikan gagasan ataupun konsep sebagai subjek penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menjadikan kedua gagasan yang dicetuskan oleh Indonesia sebagai subjek penelitian. Gagasan tersebut adalah *Dynamic Equilibrium* dan *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific*.

1.8.4 Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari hasil wawancara bersama narasumber, dokumen resmi tangan pertama, pernyataan langsung dari Menteri Luar Negeri Indonesia, baik pada periode Presiden SBY maupun Presiden Joko Widodo. Kemudian, data sekunder didapatkan dari dokumen tangan kedua atau sumber tidak langsung, seperti data yang berasal dari buku, jurnal, artikel, dan pernyataan yang dikutip oleh media massa, baik media massa lokal maupun internasional.

1.8.5 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer didapatkan dari hasil wawancara dengan narasumber, dokumen resmi tangan pertama, hingga pernyataan narasumber yang diunggah di media sosial resmi lembaga-lembaga terakait. Sedangkan, sumber data sekunder didapatkan dari dokumen tangan kedua atau dokumen yang tidak langsung dari narasumber, seperti dari buku, jurnal, artikel, dan pernyataan yang dikutip oleh sumber kedua seperti media massa, baik media massa nasional maupun internasional.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan studi kepustakaan. Wawancara dilakukan bersama beberapa orang narasumber, yaitu Dr. Yayan Ganda Hayat Mulyana selaku Kepala Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri di Kementerian Luar Negeri RI, Dr. Dinna Prapto Raharja selaku dosen di Universitas Bina Nusantara, serta Wasisto Raharjo Jati selaku peneliti di Badan Riset dan Inovasi Nasional. Sedangkan, studi kepustakaan akan dilakukan dengan riset perpustakaan dan riset internet. Riset perpustakaan sendiri adalah teknik pengumpulan data dari buku-buku maupun sumber lain di perpustakaan. Sedangkan, riset internet adalah teknik pengumpulan data dari internet dengan memperhatikan kredibilitas sumber-sumber yang digunakan.

1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data

Penafsiran atau interpretasi data diartikan dengan memberi makna yang signifikan terhadap hasil analisis, menjelaskan pola uraian, dan mencari hubungan di antara dimensi-dimensi uraian (Nugrahani, 2014, hal. 191). Penulis menggunakan metode komparatif deskriptif untuk mengolah data yang telah didapatkan. Umumnya, metode komparatif ini menggunakan studi kasus tunggal ataupun dalam jumlah yang kecil. Penelitian komparatif juga memusatkan tujuan pada relevansi penjelas dari lingkup kontekstual dan untuk memahami bagaimana konteks sistemik membentuk fenomena secara berbeda dalam pengaturan yang berbeda (Collier, 1993, hal. 105). Dengan begitu, penelitian ini dapat mendeskripsikan persamaan dan perbedaan karakteristik di antara gagasan *Dynamic Equilibrium* dan *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific*.